

ANALISIS PERENCANAAN PENDIDIKAN BERBASIS ASESMEN KEBUTUHAN KURIKULUM MERDEKA DI SMKN 1 SIMPANG EMPAT

Riski Adi Saputra¹, Murhartoyo², Suhaimi³, Sulistiyana⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat

¹2520111310017@mhs.ulm.ac.id, ²2520111310030@mhs.ulm.ac.id,

³suhaimi@ulm.ac.id, ⁴sulis.bk@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze needs assessment-based educational planning in the implementation of the Merdeka Curriculum at SMK Negeri 1 Simpang Empat. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, limited participatory observations, and document analysis of the School Operational Curriculum (KOSP), School Work Plan (RKS), School Activity and Budget Plan (RKAS), and industry partnership documents. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that educational planning has been conducted in a participatory and data-driven manner through school self-evaluation, tracer studies, and feedback from industry partners. The integration of needs assessment results into planning documents demonstrates vertical alignment between vision, programs, and budgeting. However, long-term labor market projections and outcome-based performance indicators require further strengthening. This study contributes to the development of adaptive and reflective vocational education planning models oriented toward graduate relevance and employability.

Keywords: *Educational Planning, Needs Assessment, Merdeka Curriculum*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Simpang Empat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi terhadap KOSP, RKS, RKAS, serta dokumen kemitraan industri. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis data melalui Evaluasi Diri Sekolah, tracer study, serta masukan dunia usaha dan dunia industri. Integrasi hasil asesmen kebutuhan ke dalam dokumen perencanaan menunjukkan konsistensi antara visi, program, dan anggaran. Namun, integrasi proyeksi kebutuhan industri jangka panjang dan pengukuran outcome lulusan masih perlu diperkuat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model perencanaan pendidikan vokasi yang adaptif, reflektif, dan berorientasi pada relevansi kompetensi lulusan.

Kata kunci: Perencanaan Pendidikan, Asesmen Kebutuhan, Kurikulum Merdeka

A. Pendahuluan

Perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Secara konseptual, perencanaan yang efektif harus berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternal sekolah (OECD, 2021; UNESCO, 2022). Dalam konteks manajemen berbasis sekolah, perencanaan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan (Bush, 2020). Pada pendidikan vokasi, urgensi perencanaan berbasis asesmen kebutuhan semakin kuat karena Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki mandat menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut sekolah menyusun kurikulum operasional yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis karakteristik peserta didik serta kebutuhan lokal (Kemendikbudristek, 2022). Prinsip diferensiasi pembelajaran dan penguatan kompetensi dalam Kurikulum Merdeka hanya dapat

diwujudkan apabila sekolah melakukan pemetaan kebutuhan secara sistematis melalui *needs assessment* (Rahmawati et al., 2023; Wahyuni & Setiawan, 2024).

Penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa *data-driven planning* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran (OECD, 2021; World Bank, 2022). Studi oleh Hidayat dan Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa sebagian sekolah menengah di Indonesia masih menyusun rencana kerja berbasis kepatuhan administratif, bukan hasil analisis kebutuhan. Temuan serupa disampaikan oleh Prasetyo dan Lestari (2022) yang menekankan perlunya integrasi asesmen kebutuhan dalam penyusunan RKS dan RKAS agar program sekolah lebih relevan dan berdampak. Secara empirik, tantangan pendidikan vokasi masih terlihat dari indikator ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK secara nasional mencapai 8,62%, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Di Provinsi Kalimantan Selatan, TPT

lulusan SMK tercatat sekitar 9,96%, lebih tinggi dibanding lulusan SMA maupun diploma (BPS Kalimantan Selatan, 2024). Selain itu, laporan pembangunan daerah menyebutkan bahwa tingkat serapan langsung lulusan SMK terhadap dunia kerja masih rendah dibandingkan jumlah lulusan setiap tahun (Bappeda Kalimantan Selatan, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan vokasi dan kebutuhan riil pasar kerja daerah. Penelitian oleh Firmansyah et al. (2023) menyatakan bahwa rendahnya relevansi kompetensi lulusan SMK seringkali berkaitan dengan lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan industri. Sementara itu, studi regional pendidikan vokasi di Kalimantan menunjukkan bahwa kolaborasi sekolah dengan dunia usaha belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan strategis sekolah (Yuliana & Anwar, 2022).

Dampak dari perencanaan yang belum berbasis asesmen kebutuhan tidak hanya terlihat pada tingginya angka pengangguran lulusan, tetapi juga pada rendahnya efektivitas implementasi kurikulum dan pemborosan sumber daya pendidikan

(World Bank, 2022; UNESCO, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan efektif dan kontekstual. Integrasi asesmen kebutuhan dalam perencanaan sekolah memungkinkan identifikasi kesenjangan kompetensi, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan relevansi program pendidikan vokasi (Rahmawati et al., 2023; Wahyuni & Setiawan, 2024). Namun demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis praktik perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK, khususnya di Kalimantan Selatan, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan tata kelola perencanaan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dan data.

Model perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan yang baik pada dasarnya merupakan proses sistematis yang diawali dengan identifikasi kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual satuan

pendidikan dan standar kompetensi yang diharapkan, kemudian dilanjutkan dengan penetapan prioritas kebutuhan, perumusan program, implementasi, serta evaluasi berkelanjutan. Altschuld dan Watkins (2021) menegaskan bahwa model asesmen kebutuhan modern harus memuat tiga tahapan utama, yaitu *pre-assessment* (penentuan fokus dan pemangku kepentingan), *assessment* (pengumpulan dan analisis data multi-sumber), serta *post-assessment* (perumusan rekomendasi berbasis prioritas). Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini diperkuat dengan prinsip *evidence-based planning* yang menempatkan data hasil belajar, evaluasi diri sekolah, tracer study lulusan, serta kebutuhan industri sebagai dasar perumusan program (OECD, 2021). UNESCO (2022) menambahkan bahwa model perencanaan yang efektif harus bersifat partisipatif, melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta mitra industri untuk memastikan relevansi dan keberterimaan program.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain

studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses, dinamika, dan praktik perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada tingkat satuan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, perspektif, pengalaman, serta konstruksi sosial para pemangku kepentingan secara kontekstual dan holistik (Creswell & Poth, 2023). Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena dalam setting alamiah (natural setting) dengan peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga relevan untuk mengkaji praktik perencanaan yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu praktik perencanaan pendidikan di satu sekolah tertentu. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap suatu sistem yang terikat (bounded system) dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas (Yin, 2021). Melalui desain ini, penelitian dapat

menggali secara rinci mekanisme identifikasi kebutuhan, pola pengambilan keputusan, keterlibatan aktor sekolah, serta integrasi hasil asesmen kebutuhan dalam dokumen perencanaan. Studi kasus juga memungkinkan penggunaan berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Stake, 2020).

Rancangan penelitian dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang bersifat siklikal. Tahap pertama adalah identifikasi fokus penelitian dan perumusan pertanyaan penelitian berdasarkan kajian literatur mengenai perencanaan berbasis asesmen kebutuhan. Tahap kedua adalah studi pendahuluan melalui telaah dokumen sekolah dan observasi awal untuk memahami konteks implementasi kurikulum. Tahap ketiga adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Tahap keempat adalah analisis data secara tematik, dan tahap kelima adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi temuan. Proses ini dilakukan secara simultan dengan prinsip iterative data analysis, yaitu analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data untuk

memperdalam kategori dan memperjelas pola temuan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Objek penelitian adalah praktik perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada tingkat satuan pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada proses penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), termasuk mekanisme analisis kebutuhan internal dan eksternal sekolah. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka serta memiliki program keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri daerah, sehingga sesuai dengan konteks penelitian tentang perencanaan berbasis kebutuhan.

Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua program keahlian, dan guru produktif. Informan dipilih

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan sekolah. Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif menekankan pemilihan informan yang kaya informasi (information-rich cases) untuk memperoleh data mendalam dan relevan (Creswell & Poth, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur untuk menggali proses analisis kebutuhan, jenis data yang digunakan dalam perencanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta tantangan yang dihadapi sekolah. Kedua, observasi partisipatif terbatas dilakukan pada kegiatan penyusunan atau evaluasi perencanaan sekolah guna memahami praktik nyata dan dinamika interaksi antaraktor. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi sekolah

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi kebutuhan di SMK Negeri 1 Simpang Empat dilaksanakan secara formal dan terstruktur melalui rapat kerja

tahunan, forum penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), serta integrasi dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tiga program keahlian, yaitu Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer dan Jaringan, serta Desain Komunikasi Visual, yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di wilayah Kalimantan Selatan. Sekolah menggunakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai instrumen utama dalam memetakan capaian dan kesenjangan kinerja, sehingga perencanaan yang disusun bersifat reflektif dan korektif terhadap kelemahan periode sebelumnya.

Penyusunan perencanaan pendidikan di SMK Negeri 1 Simpang Empat telah diselaraskan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter peserta didik dan penerapan deep learning dalam pembelajaran. Sekolah mengembangkan perencanaan pembelajaran dengan memetakan capaian pembelajaran (CP) ke dalam alur tujuan pembelajaran (ATP) yang kontekstual

dan relevan dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja. Guru tidak lagi hanya berfokus pada ketuntasan materi, tetapi pada pendalaman konsep, penguatan nalar kritis, kemampuan problem solving, serta keterampilan reflektif peserta didik. Perencanaan dalam Kurikulum Merdeka dilakukan melalui tahapan analisis karakteristik peserta didik, identifikasi kebutuhan kompetensi industri, perumusan tujuan pembelajaran esensial, penyusunan modul ajar berbasis proyek, serta integrasi asesmen diagnostik dan formatif sebagai dasar diferensiasi pembelajaran. Dalam praktiknya, pengembangan perencanaan dilakukan secara kolaboratif melalui forum guru. Guru menganalisis hasil asesmen awal untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan belajar peserta didik, kemudian merancang strategi pembelajaran yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep inti (essential understanding). Model pembelajaran berbasis proyek dan problem-based learning digunakan untuk mendorong keterkaitan antara teori dan praktik, sehingga peserta didik tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga rasionalitas di balik setiap proses

kerja. Penekanan pada deep learning tercermin dari penggunaan tugas autentik yang menuntut analisis, perancangan solusi, evaluasi hasil, dan refleksi diri. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya mengatur alur kegiatan belajar, tetapi membangun pengalaman belajar bermakna yang mengintegrasikan aspek kognitif, keterampilan, dan pembentukan karakter seperti tanggung jawab, disiplin, etos kerja, serta kolaborasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan di SMK Negeri 1 Simpang Empat berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah strategis sekaligus pengambil keputusan utama dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kepala sekolah memimpin forum rapat kerja, mengoordinasikan penyusunan KOSP, RKS, dan RKAS, serta menjembatani komunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dalam praktiknya, kepala sekolah juga berfungsi sebagai instructional leader yang menekankan integrasi kebutuhan industri ke dalam pembelajaran berbasis proyek dan

praktik kerja lapangan. Peran ini menunjukkan karakter kepemimpinan strategis yang menempatkan perencanaan sebagai instrumen transformasi sekolah, bukan sekadar kewajiban administratif. Perencanaan berbasis asesmen kebutuhan disusun melalui tahapan sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah dan pemetaan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal, dilanjutkan dengan pengumpulan serta analisis data dari berbagai sumber, penetapan prioritas kebutuhan, perumusan tujuan strategis, penyusunan program dan kegiatan, hingga evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, OECD (2021) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan yang responsif menuntut keterpaduan antara analisis kebutuhan, penetapan indikator keberhasilan, dan penyalarsan alokasi sumber daya. UNESCO (2022) juga menekankan pentingnya proses reflektif dan partisipatif dalam setiap tahapan agar perencanaan tidak hanya berbasis data, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil pemangku kepentingan. Dengan demikian, tahapan penyusunan perencanaan berbasis asesmen kebutuhan mencakup: (1) analisis

konteks dan kesenjangan; (2) pengumpulan serta triangulasi data; (3) penentuan prioritas kebutuhan; (4) perumusan tujuan dan strategi; (5) integrasi ke dalam dokumen program dan anggaran; serta (6) monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan di SMK Negeri 1 Simpang Empat disusun secara sistematis berdasarkan hasil asesmen kebutuhan yang komprehensif. Proses perencanaan tidak dimulai dari penyusunan program secara normatif, melainkan dari identifikasi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang relevan dengan karakteristik program keahlian dan dinamika industri di wilayah Kalimantan Selatan. Sekolah terlebih dahulu memetakan kompetensi inti yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), baik melalui forum sinkronisasi kurikulum, masukan langsung dari mitra industri, laporan praktik kerja lapangan, maupun hasil tracer study lulusan.

Keterlibatan DU/DI diwujudkan melalui kemitraan praktik kerja lapangan, sinkronisasi kurikulum, serta masukan terhadap standar kompetensi lulusan. Dunia industri untuk program Teknik Kendaraan

Ringan dan Teknik Komputer dan Jaringan terlibat aktif dalam memberikan umpan balik terhadap kesiapan kerja lulusan. Hal ini mendukung tujuan sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja mandiri dan diserap oleh DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Sementara itu, komite sekolah dilibatkan dalam forum perencanaan dan persetujuan anggaran, terutama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sekolah. Keterlibatan komite juga mendukung misi sekolah dalam membangun budaya religius dan kepedulian lingkungan melalui program berbasis masyarakat. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan konsep partisipatif dalam manajemen berbasis sekolah yang menekankan distribusi kewenangan dan tanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan (Bush, 2020; UNESCO, 2022). Partisipasi yang efektif bukan hanya kehadiran dalam forum formal, tetapi keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Hidayat dan Kurniawan (2021) menegaskan bahwa perencanaan yang partisipatif meningkatkan komitmen implementasi program

karena para aktor merasa memiliki (sense of ownership) terhadap kebijakan yang disusun. Perencanaan di SMK Negeri 1 Simpang Empat menunjukkan bahwa partisipasi telah melampaui formalitas administratif dan cenderung bersifat substantif, terlihat dari kontribusi nyata guru dan DUDI dalam penyusunan program prioritas dan sinkronisasi kurikulum. Namun demikian, penguatan mekanisme umpan balik berkelanjutan dari industri masih diperlukan agar partisipasi tersebut semakin berbasis pada evaluasi kinerja lulusan secara sistematis.

Berkaitan dengan integrasi hasil asesmen ke dalam dokumen perencanaan, analisis dokumen menunjukkan bahwa KOSP telah memuat hasil asesmen kebutuhan, termasuk karakteristik peserta didik, kondisi sarana prasarana, serta kebutuhan penguatan kompetensi berbasis industri. Dokumen RKS disusun berdasarkan prioritas nyata yang merujuk pada Rapor Pendidikan dan hasil Evaluasi Diri Sekolah, sehingga program yang dirancang lebih terfokus pada peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta perluasan kemitraan industri. RKAS selanjutnya

mencerminkan kebutuhan strategis tersebut melalui alokasi anggaran pada pengadaan sarana praktik, pelatihan guru, serta kegiatan praktik kerja lapangan. Secara konseptual, integrasi ini dapat dianalisis melalui prinsip alignment planning, yaitu keselarasan antara analisis kebutuhan, tujuan strategis, dan alokasi sumber daya (Bryson, 2021). OECD (2021) menegaskan bahwa perencanaan pendidikan yang efektif harus menunjukkan keterpaduan vertikal antara visi, program, dan anggaran agar kebijakan tidak terfragmentasi. Dalam konteks ini, terdapat konsistensi vertikal di SMK Negeri 1 Simpang Empat: visi tentang lulusan inovatif dan berkompotensi diterjemahkan ke dalam misi pembelajaran berbasis IT dan kerja sama DU/DI, kemudian dijabarkan dalam program prioritas RKS, dan akhirnya didukung melalui alokasi anggaran dalam RKAS. Konsistensi ini menunjukkan bahwa perencanaan sekolah telah bergerak menuju model perencanaan strategis yang terintegrasi. Namun, meskipun terdapat konsistensi vertikal, penguatan evaluasi berbasis capaian kinerja masih diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran

benar-benar berdampak pada peningkatan serapan lulusan di dunia kerja. Wahyuni dan Setiawan (2024) menegaskan bahwa integrasi dokumen perencanaan belum cukup tanpa indikator kinerja yang terukur dan evaluasi berbasis data. Oleh karena itu, meskipun integrasi KOSP, RKS, dan RKAS di sekolah ini telah menunjukkan keselarasan struktural, penguatan indikator outcome seperti tingkat penyerapan lulusan, kompetensi kewirausahaan, dan kepuasan industri menjadi langkah strategis berikutnya. Secara keseluruhan, keterlibatan pemangku kepentingan dan integrasi hasil asesmen dalam dokumen perencanaan di SMK Negeri 1 Simpang Empat telah menunjukkan karakter perencanaan partisipatif dan terintegrasi yang selaras dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Tantangan ke depan terletak pada penguatan dimensi evaluatif dan pengembangan budaya refleksi berbasis data agar perencanaan tidak hanya konsisten secara dokumen, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas lulusan dan daya saing sekolah.

Proses evaluasi perencanaan di SMK Negeri 1 Simpang Empat

dilaksanakan melalui mekanisme monitoring rutin yang terjadwal, baik dalam bentuk rapat evaluasi bulanan, evaluasi tengah semester, maupun evaluasi akhir tahun. Monitoring dilakukan terhadap keterlaksanaan program pembelajaran, capaian kompetensi peserta didik, efektivitas praktik kerja lapangan, serta realisasi anggaran dalam RKAS. Kepala sekolah bersama tim manajemen dan ketua program keahlian secara berkala menelaah kesesuaian antara rencana dan implementasi di lapangan. Selain itu, hasil supervisi akademik dan laporan kegiatan praktik menjadi bagian dari bahan refleksi bersama. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa hasil evaluasi tersebut tidak berhenti pada tahap pelaporan administratif, melainkan digunakan secara nyata sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara evaluasi program berjalan dan penetapan prioritas baru dalam RKS dan RKAS periode selanjutnya.

Dalam perspektif teoretis, praktik ini dapat dianalisis menggunakan model Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang diperkenalkan oleh Deming dan

banyak diadaptasi dalam manajemen mutu pendidikan (Bush, 2020). Model PDCA menekankan bahwa perencanaan (Plan) harus diikuti implementasi (Do), pemeriksaan atau evaluasi (Check), serta tindakan perbaikan (Act) sebagai siklus berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, siklus tersebut telah terlihat dalam praktik perencanaan sekolah: program direncanakan dalam dokumen strategis, dilaksanakan dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah, dievaluasi melalui monitoring rutin, dan hasilnya digunakan untuk menyusun perbaikan program di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa siklus perencanaan di sekolah telah bersifat reflektif dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, Suryadi, dan Nugraha (2023) yang menunjukkan bahwa sekolah yang melakukan refleksi berbasis data secara sistematis mengalami peningkatan kualitas implementasi kurikulum secara signifikan, terutama dalam aspek relevansi pembelajaran dengan kebutuhan industri. Refleksi berbasis data memungkinkan sekolah mengidentifikasi secara lebih akurat

faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan program.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perencanaan pendidikan berbasis asesmen kebutuhan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Simpang Empat telah menunjukkan karakter partisipatif, berbasis data, dan reflektif. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara sistematis melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS), analisis capaian pembelajaran, tracer study lulusan, serta masukan dari dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Hasil asesmen kebutuhan tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis sekolah, yaitu KOSP, RKS, dan RKAS, sehingga terdapat konsistensi vertikal antara visi, program prioritas, dan alokasi anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi telah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi. Dari sisi implementasi, keterlibatan kepala sekolah, guru produktif, ketua program keahlian, komite sekolah,

dan mitra industri memperlihatkan bahwa perencanaan dilaksanakan secara kolaboratif dan substantif. Guru berperan aktif dalam memetakan kesenjangan kompetensi peserta didik serta menerjemahkan kebutuhan industri ke dalam desain pembelajaran teoritis dan praktik. Integrasi kebutuhan dunia kerja ke dalam modul ajar, pembelajaran berbasis proyek, serta praktik kerja lapangan menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan dinamika industri regional, khususnya sektor otomotif, teknologi informasi, dan industri kreatif di Kalimantan Selatan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi kebutuhan industri ke dalam dokumen strategis jangka menengah dan panjang belum sepenuhnya berbasis proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara longitudinal. Analisis kebutuhan eksternal masih lebih bersifat responsif terhadap umpan balik aktual dibandingkan berbasis perencanaan prediktif yang memanfaatkan data makro ketenagakerjaan dan tren ekonomi regional. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi program prioritas,

terutama dalam pembaruan sarana praktik dan penguatan kapasitas guru. Dengan demikian, meskipun mekanisme perencanaan telah memenuhi prinsip needs-based planning dan alignment planning, penguatan pada aspek analisis proyeksi industri dan pengukuran outcome lulusan masih diperlukan. Dari perspektif manajemen mutu, siklus evaluasi di sekolah telah berjalan secara reflektif melalui monitoring rutin dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan program tahun berikutnya. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perencanaan pendidikan vokasi berbasis asesmen kebutuhan ditentukan oleh integrasi tiga dimensi utama, yaitu analisis kebutuhan internal, integrasi kebutuhan industri, dan keselarasan dokumen strategis dengan alokasi sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Altschuld, J. W., & Watkins, R. (2021). Needs assessment: Trends and a view toward the future. *New Directions for Evaluation*, 2021(170), 13–24.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan 2024*. BPS Indonesia.
- Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Laporan pembangunan pendidikan vokasi Kalimantan Selatan*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- BPS Kalimantan Selatan. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan 2024*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bryson, J. M. (2021). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Firmansyah, R., Utami, S., & Hendra, A. (2023). Vocational education planning and workforce alignment in Indonesia. *Journal of Technical Education and Training*, 15(2), 112–125.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2021). Perencanaan partisipatif dalam meningkatkan komitmen implementasi program sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 115–128.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

- OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education systems*. OECD Publishing.
- Prasetyo, A., & Lestari, D. (2022). Integrating needs assessment into school strategic planning. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(3), 210–224.
- Pratama, R., & Widodo, J. (2022). Integrasi kebutuhan dunia kerja dalam perencanaan SMK. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(2), 155–168.
- Rahmawati, D., Suryadi, A., & Nugraha, F. (2023). Perencanaan berbasis kebutuhan industri pada sekolah menengah kejuruan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2), 145–158.
- Stake, R. E. (2020). *The art of case study research revisited*. Sage Publications.
- UNESCO. (2022). *Transforming technical and vocational education and training for sustainable development*. UNESCO Publishing.
- Wahyuni, S., & Setiawan, H. (2024). Implementasi perencanaan sekolah berbasis data dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 16(1), 22–34.
- World Bank. (2022). *Improving workforce readiness in Indonesia: The role of vocational education reform*. World Bank Group.
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yuliana, S., & Anwar, M. (2022). Industry collaboration in vocational school strategic planning. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 28(2), 134–148.